

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Good Corporate Governance

2.1.1.1 Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan menciptakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 adalah : “Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam publikasi yang pertanyaannya mempergunakan pengertian *Calbury Committee* dalam Hery (2010:11) adalah :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.”

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP117/M-MB/2002 (2002:pasal1), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Menurut Ardeno Kurniawan (2012:27) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara lain manajemen, direksi, pemegang saham, dan stakeholders lain seperti pegawai, kreditor, dan masyarakat.”

Menurut Sukrisno Agoes (2013:101), definisi *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga sering disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG, 2012), *Good Corporate Governance* adalah :

“Struktur, sistem dan proses yang digunakan organ perusahaan sebagai upaya yang memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya, dan aturan yang berlaku”.

Dari beberapa definisi mengenai *Good Corporate Governance* di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar.

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alternative penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait baik itu untuk BUMN ataupun perusahaan swasta. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Surat keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (2002:pasal 3), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam keutusan ini meliputi :

1. “Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara aktif;
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Prinsip-prinsip tentang *Good Corporate Governance* ini sudah ada dari beberapa sumber, tetapi pada hakikatnya adalah sama. Berbagai aturan main dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik.

Selain pengelolaannya yang harus berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, keberhasilan BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari kinerja keuangannya dan harga saham. Penilaian atas kinerja keuangan BUMN dapat dilihat dari laporan keuangan BUMN tersebut. Laporan keuangan ini disajikan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk transparansi. Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan dengan tepat.

Menurut Valery G. Kumat (2011:22) menyatakan terdapat empat prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Kewajaran (*Fairness*)
Kewajaran adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi pemegang saham”.
Prinsip ini perlu ditegakan oleh perusahaan dalam bentuk :

- a. Penyajian informasi secara *full disclosure* menyangkut setiap materi yang relevan bagi para pemegang saham (termasuk aspek remunerasi para Komisaris atau Direksi).
 - b. Berbagai larangan terkait “permainan” harga saham (wajib bagi perusahaan Tbk), seperti sistem pembagian dividen tersendiri bagi internal shareholders, perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*), otoritas penetapan harga dengan otoritas tanggal (*self dealing*).
2. Keterbukaan (*Transparancy*)
Keterbukaan adalah informasi secara akurat dengan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan”.
- Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk :
- a. Pengembangan Sistem Akuntansi (*Accounting System*) perusahaan berdasarkan standar akuntansi (PSAK), kelaziman terkait kualitas pelaporan, serta secara berkala diperiksa oleh auditor yang disetujui oleh RSUP.
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*) untuk menunjang efektifitas dalam hal penelusuran permasalahan disekitar kinerja, serta pengambilan keputusan manajemen yang efektif.
3. Akuntabilitas (*Accountability*)
Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku”.
- Hal ini diterapkan antara lain dengan :
- a. Merumuskan kembali peran atau fungsi Audit Internal sebagai mitra bisnis strategic berdasarkan *best practice* (bukan sekedar ada) yaitu berupa “risk based auditing”.
 - b. Memperkuat pengawasan internal dan pengelolaan risiko dengan pembentukan Komite Audit atau Komite Risiko yang memperkuat komisaris independen dalam Dewan Komisaris.
4. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)
Pertanggung Jawaban adalah bentuk pertanggung jawaban seluuh internal stakeholders (Komisaris dan Direksi, Karyawan) kepada eksternal stakeholders lainnya.
- Hal ini diungkapkan dengan cara :
- a. Membangun lingkungan bisnis yang sehat, menghindari penyalahgunaan tanggung jawab atau wewenang, mengembangkan profesionalisme, serta menjunjung etika universal dan budaya setempat.
 - b. Menyatakan kepedulian terhadap permasalahan aktual di masyarakat yang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, seperti penuntasan kemiskinan dan kepedulian terhadap dampak bencana alam, dan sebagainya.

Ketiga prinsip-prinsip mengenai *Good Corporate Governance* tersebut memiliki pikiran pokok yaitu keterbukaan perusahaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Selain itu perusahaan dituntut untuk dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif.

Dalam pengelolaan perusahaan juga dituntut untuk tetap berada pada jalur hukum dan selalu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selain itu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan-undangan yang berlaku adalah hal yang harus menjadi perhatian serius dari perusahaan karena merupakan salah satu faktor bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

2.1.1.3 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun menurut Adrian (2011), unsur-unsur dalam *Good Corporate Governance* yaitu :

1. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

- a. Pemegang Saham
- b. Direksi
- c. Dewan komisaris
- d. Manajer
- e. Karyawan
- f. Sistem remunerasi berdasarkan kinerja
- g. Komite audit

Unsur-unsur yang diperlukan di dalam perusahaan adalah :

- a. Keterbukaan dan Kerahasiaan (*Disclosure*)
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Kesetaraan
- e. Aturan dari *code of conduct*

2. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :

- a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
- b. Investor
- c. Instusi penyedia informasi
- d. Akuntan publik
- e. Intitusi yang memiliki kepentingan publik bukan golongan
- f. Pemberi pinjaman
- g. Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan adalah :

- a. Aturan dari *code of conduct*
- b. Kesetaraan
- c. Akuntabilitas
- d. Jaminan hukum

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.

2.1.1.4 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Esensi *Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. *Good Corporate Governance* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *check and balances* di perusahaan.

Zarkasy, Moh Wahyudin (2014:19): penerapan *Good Corporate Governance* memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimalisasi potensi benturan
3. Fokus pada strategi-trategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefits*)
6. Promosi citra korporat (*corporate image*)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan investor

Dengan adanya *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan bukan lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan akan tetapi, ditetapkan setelah mendapatkan masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholders. Selain itu, *corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (karena ada system yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan), dan lebih

transparan dan juga akan meningkatkan kepercayaan bahwa perusahaan dapat mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

Menurut Hery (2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu :

1. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan kearah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Manfaat *Good Corporate Governance* bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

2.1.1.5 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* dilingkungan BUMN menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 yang dalam Meilani Hamdani dan Gunoro Nupikso (2016) yaitu :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan

adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisiensi, dan efektif, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar Organ Persero atau Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi Perkembangan investasi nasional.

Penerapan GCG dapat dilihat dari laporan pengungkapan GCG yang biasanya tersaji dalam laporan tahunan BUMN atau laporan tersendiri terpisah dari laporan tahunan.

2.1.1.6 Pihak-Pihak yang Terkait Dengan *Good Corporate Governance*

Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2010:36) pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen akan berkaitan dengan pihak – pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
Hak pemegang saham harus dilindungi, agar pemegang saham dapat melaksanakan berdasarkan dengan prosedur yang benar dan ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Dewan Komisaris
Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, Dewan Komisaris adalah suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Oleh karena itu, maka dewan komisaris adalah menilai dan mengarahkan strategi perusahaan jangka panjang, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen.
3. Direksi
Dewan Direksi bertugas mengelola perseroan, dan Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
4. Komite Audit
Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang perhatian Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan audit internal di perusahaan.
5. Auditor Internal
Auditor Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki akses langsung ke Komite Audit. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Auditor Internal membantu manajemen senior dalam menilai resiko-resiko utama yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian
6. Auditor Eksternal
Auditor Eksternal bertanggungjawab memberikan opini pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, auditor independen bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit yang dibuat.
7. Sekretaris Perusahaan
Fungsi Sekretaris Perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang Direktur Perusahaan Tercatat atau Pejabat Perusahaan Tercatat yang khusus ditunjukkan untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris Perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.
8. Manajer dan Karyawan
Manajer menempati posisi yang strategis karena pengetahuan mereka dalam pengambilan keputusan dari hari ke hari. Manajer profesional biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi besar. Karyawan

yang khususnya diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

9. Pihak-pihak yang berkepentingan
Pemerintah terlibat dalam *Corporate Governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditur yang memberi pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Menurut Permen BUMN Nomor : Per- 01/MBU/2011 pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen akan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Eksternal Auditor
4. Komite Audit
5. Auditor Internal
6. Manajer dan Pekerja
7. Stakeholders lainnya.

2.1.1.7 Kriteria *Good Corporate Governance*

Menurut versi *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Hery (2010:6) ada lima kriteria dari *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. *“The rights of shareholders*
Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan atau laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan se-transparan mungkin.
2. *The equitable treatment of shareholders*
Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hal atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi

perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota *corporate board* dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.

3. *The role of stakeholders in corporate governance*
Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan stakeholders demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta finansial.
4. *Disclosure and transparency*
Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan stakeholders. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.
5. *The responsibilities of the board*
Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan peraturan yang strategis atas jalannya operasional maupun finansial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh corporate board, dan adanya pertanggung jawaban corporate board kepada perusahaan dan pemegang saham.”

2.1.1.8 Pengukuran *Good Corporate Governance*

1. BUMN wajib melakukan pengukuran untuk mengidentifikasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam bentuk :
 - a. Penilaian (*assessment*), yaitu program mengidentifikasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
 - b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN

yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

2. Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi *Good Corporate Governance* pada BUMN yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjukkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang, dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
4. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang *Good Corporate Governance*, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.
5. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (*asistensi*) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang *Good Corporate Governance*.
6. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

7. Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunkan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang *Good Corporate Governance*, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
8. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
9. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan.

2.1.1.9 Indikator Penilaian *Good Corporate Governance*

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG, 2012) yang menyatakan bahwa : “*Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah pemeringkat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *corporate governance* (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding (*benchmarking*).

Menurut *Indonesia Institusie of corporate Governance* (IICG), CGPI

(*Corporate Governance Perception Index*) (2012) menggunakan empat tahapan penilaian sebagai persyaratan penilaian yang wajib diikuti oleh semua perusahaan.

Empat tahapan tersebut yaitu :

- a. “*Corporate Governance Perception Index* Self Assessment
- b. Kelengkapan dokumen
- c. Penyusunan makalah dan presentasi
- d. Observasi”.

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan penilaian proses riset dalam penentuan nilai *corporate governance* adalah sebagai berikut :

- a. *Self Assessment*

Pengisian kuesioner *Self Assessment* terkait penerapan GCG. Tahapan ini melibatkan seluruh organ dan anggota perusahaan serta pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholder*) dalam memberikan tanggapan terhadap implementasi GCG perusahaan.

- b. Kelengkapan dokumen

Penelusuran kelengkapan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan GCG. Kelengkapan dokumen mempersyaratkan pemenuhan dokumen terkait penerapan GCG dan praktik bisnis yang beretika serta kelengkapan sistem yang berlaku di perusahaan.

- c. Penyusunan Makalah dan Presentasi

Pada tahapan ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan tentang kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait GCG dalam bentuk makalah dengan memperlihatkan sistematika penyusunan yang telah ditentukan.

d. Observasi

Tahap klasifikasi dan konfirmasi data dan informasi seputar penilaian melalui diskusi dan kunjungan ke perusahaan. Diskusi observasi melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan pimpinan manajerial perusahaan.

Adapun bobot nilai yang digunakan untuk menilai *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tahapan dan Bobot Nilai CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)

| No. | Indikator | Bobot(%) |
|-----|-----------------------------------|----------|
| 1. | <i>Self Assesment</i> | 15 |
| 2. | Kelengkapan dokumen | 25 |
| 3. | Penyusunan makalah dan presentasi | 12 |
| 4. | Observasi ke perusahaan | 48 |

Sumber : www.iicg.org

Tabel 2.2

Kategori pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)

| Skor | Level Terpercaya |
|---------------|-------------------|
| 85,00 – 100 | Sangat Terpercaya |
| 70,00 – 84,99 | Terpercaya |
| 55,00 – 69,99 | Cukup Terpercaya |

Sumber : *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*, 2011

2.1.1.10 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance*

Menurut Achmad Daniri (2005:15) ada dua faktor yang memegang peranan terhadap keterlibatan penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. “Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah :

- a. Terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Adanya dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* dan *clean governance* menuju *good governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapat contoh penerapan *Good Corporate Governance* yang tepat (*best practies*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dan professional. Dengan kata lain, sejenis benchmark (acuan) terbangunnya system tata nilai social yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di masyarakat.

2. Faktor Internal

Faktor internal adalah mendorong keberhasilan prakti *Good Corporate Governance* yang berhasil dari dalam perusahaan faktor internal tersebut diantaranya adalah :

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam mekanisme serta system kerja manajemen di perusahaan.
- b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.
- c. Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance*.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan public dapat mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu”.

Menurut KNKG (2009) keberhasilan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikat baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
5. Dukungan dari pihak *Stakeholders*.
6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Perusahaan

Pengertian Perusahaan menurut Abdul Kadir Muhammad (2010:12) adalah : “Perusahaan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi dengan acuan laba.”

Sugi Arti (2015) mendefinisikan Perusahaan sebagai berikut :

“perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.”

Sedangkan menurut Murti Sumami (1997) yang menyatakan bahwa :

“Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat

dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah seluruh organisasi yang melakukan kegiatan produksi baik dalam bentuk barang ataupun jasa bagi masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

2.1.2.2 Pengertian Ukuran Perusahaan

Pengertian Ukuran Perusahaan menurut Bambang Riyanto (2012:305) adalah sebagai berikut : “Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada nilai equity, nilai penjualan, atau nilai aktiva.”

Sedangkan menurut Jogiyanto (2016:282) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain)”.

Demikian pula menurut Aris Mardiyono dan Gita Sugiarti (2015) ukuran perusahaan sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut”.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dilihat dari sisi kemampuan akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk membiayai investasinya dalam rangka meningkatkan labanya.

2.1.2.3 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut :

“Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah suatu produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha petungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Kriteria ukuran perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3

Kriteria Ukuran Perusahaan

| Ukuran Perusahaan | Kriteria | |
|-------------------|---|-------------------|
| | Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) | Penjualan Tahunan |
| Usaha Mikro | Maksimal 50 Juta | Maksimal 300 Juta |
| Usaha Kecil | >50Juta – 500 Juta | >300 Juta – 2,5 M |
| Usaha Menengah | >10 Juta – 10 M | >2,5 M – 50 M |
| Usaha Besar | >10 M | >50 M |

Sumber : UU No. 17 Tahun 2013

Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan untuk mendapatkan pinjaman karena perusahaan besar relative lebih mampu untuk menghasilkan laba.

2.1.2.4 Indikator Ukuran Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil didasari oleh indikator yang digunakannya. Adapun indikator dalam ukuran perusahaan menurut Edy Suwito dan Arleen Herawaty (2015) adalah : “tolak aktiva, nilai pasar saham, total pendapatan dan lain-lain”.

Sedangkan menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) bahwa :

“Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Lebih rinci, semakin besar total aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat”.

Adapun menurut Ferry dan Jones (2014) menyatakan bahwa :

“Besarnya kecilnya suatu perusahaan ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Salah satu tolak ukur yang dapat menunjukkan besarnya kecilnya perusahaan adalah dengan melihat total aktiva dari perusahaan tersebut”.

Bestivanto (2013:15) menyatakan bahwa :

“Ukuran perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total asset yang kecil”.

Menurut Werner R. Murhadi (2013) dalam Maretha (2016) menyatakan bahwa : “Firm Size diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural”.

Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan menurut Jogyanto (2016:282), diukur dengan perhitungan logaritma dari total aktiva :

$$\text{Ukuran Perusahaan (Size)} = \text{Ln Total Asset}$$

Metode pengukuran diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan ditentukan melalui ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Indikator yang penulis gunakan dalam metode pengukuran ukuran perusahaan adalah Logaritma Total Aset. Indikator ini dipilih karena menggambarkan kekayaan perusahaan. Hal ini akan memancing investor ataupun kreditor untuk menanamkan modal mereka. Suatu perusahaan yang besar hanya akan punya pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya control dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan *natural log (Ln)* dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Jika nilai total asset langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan *natural log* nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal sebenarnya.

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja menurut Alimiyah dan Padji (2003:215) mengatakan

bahwa :

“Kinerja atau performance adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya”.

Menurut Indra Bastian (2001:329) menyebutkan bahwa :

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”.

Menurut Wibowo (2012) menyatakan bahwa definisi kinerja yaitu :

“Kinerja berasal dari pengertian performance. Adapun pengertian makna lain, tidak hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung”.

Menurut Irham Fahmi (2014:5) menyatakan bahwa :

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi kegiatan/program/kebijaksanaan dalam perumusan, skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.”

2.1.3.2 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Syafarudin (2003:96) menyatakan bahwa :

“Kinerja keuangan adalah mengukur sampai sejauh mana prestasi, peningkatan, posisi, atau performance dari nilai perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan baik melalui neraca maupun laba rugi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:2) menyatakan bahwa : “Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah proses dan hasil kerja dari suatu perusahaan yang biasa dijadikan alat ukur pencapaian atau keberhasilan perusahaan.

2.1.3.3 Tahap – Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:4) menyatakan bahwa ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum sebagai berikut :

- 1) “Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang dibuat tersebut dengan penerapan kaedah yang berlaku umum dalam akuntansi sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

- 3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

Metode yang umum dipergunakan untuk melakukan perhitungan ini ada 2

(dua) adalah :

- a. *“Time Series Analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
- b. *Cross Sectional Approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antar satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
- 4) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut.
- 5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat diselesaikan.”

2.1.3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat pada analisis laporan keuangan.

Salah satu analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan .

Selamet Riyadi (2006:155) menyatakan bahwa :

“Rasio Keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan baik, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada periode tertentu”.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2016:74) Analisis Rasio tersebut yaitu di antaranya sebagai berikut :

- 1) “Rasio Likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas terdiri dari : *cash ratio, current ratio, acid test ratio atau quick ratio*.
- 2) Rasio Aktivitas, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktifitas aset. Rasio Aktivitas terdiri dari : *inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, days sales outstanding, total assets turnover*
- 3) Rasio Solvabilitas, untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
- 4) Rasio Profitabilitas, untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Profitabilitas). Rasio Profitabilitas terdiri dari : Profit Margin, *Return On Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Earning PerShare (EPS)*”.

a. Return On Investment (ROI)

Return on Investment (ROI), dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan, dimana dalam analisis laporan keuangan mempunyai arti yang penting sebagai salah satu teknik analisis yang biasanya digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Menurut Munawir (2002;89) ROI adalah :

“Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dan untuk menghasilkan keuntungan.”

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROI adalah :

$$ROI = \frac{EAT}{Total Assets} \times 100\%$$

Sumber : Munawir (2002:89)

b. Return On Asset (ROA)

Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba atau kurangnya laba mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian penganalisa didalam menilai profitabilitas suatu perusahaan.

Mamduh M. Hanafi (2016:157) ROA adalah :

“ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Variasi dalam perhitungan ROA, di samping perhitungan seperti sebelumnya, adalah dengan memasukan biaya pendanaan dengan utang. Dividen yang merupakan biaya pendanaan dengan saham dalam analisis ROA tidak diperhitungkan. Biaya bunga ditambahkan ke laba yang diperoleh perusahaan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber : Mamduh M. Hanafi (2016:157)

c. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu alat utama investor yang digunakan dalam menilai kelayakan suatu saham. Dalam perhitungan secara umum ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama satu tahun terakhir. Pribadi (2008) dalam Eko Adhy Kumianto (2011) menyatakan bahwa : “ROE dapat memberikan beberapa gambaran mengenai perusahaan antara lain :

1. “Kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Profitability)
2. Efisiensi perusahaan dalam mengelola asset (Asset manajemen)
3. Hutang yang dipakai untuk melakukan usaha (Financial Laverage).”

Mamduh M.Hanafi (2016:178) ROE adalah : “rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham biasa.”

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROE adalah :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Pemegang Saham}}$$

Sumber : Mamduh M.Hanafi (2016:178)

d. *Earning Per Share (EPS)*

EPS merupakan alat analisis tingkat profitabilitas perusahaan yang menggunakan konsep laba konvensional. EPS adalah salah satu dari dua alat ukur yang sering digunakan untuk mengevaluasi saham biasa disamping PER (Price Earning Ratio) dalam lingkaran keuangan.

Mamduh M. Hanafi (2016:185) EPS adalah : “Rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor saham (atau calon investor saham) untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dipunyai”.

Menurut Feb Tri Wijayanti (2011) EPS adalah : “*Earning Per Share* (EPS) merupakan laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen dibagi dengan total seluruh saham”.

Rumus yang digunakan untuk menghitung EPS adalah :

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Setelah pajak} - \text{Dividen}}{\text{Total Seluruh Saham}}$$

Sumber : Feb Tri Wijayanti (2011:8)

- 5) Rasio Pasar, Untuk melihat perkembangan nilai perusahaan relative terhadap nilai buku perusahaan. Rasio Pasar terdiri dari : *price earning ratio, dividend yield, dividend payout ratio.*”

Rumus yang digunakan untuk menghitung PER adalah :

$$PER = \frac{\text{Harga Pasar per Lembar}}{\text{Earning per Lembar}}$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung *dividend yield* adalah :

$$Dividen Yield = \frac{\text{Dividen per Lembar}}{\text{Harga Pasar Saham per Lembar}}$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung *dividend payout ratio* adalah :

$$Dividen payout ratio = \frac{\text{Dividen per Lembar}}{\text{Earning per Lembar}}$$

Diantara keempat rasio profitabilitas yang telah dijelaskan, peneliti memutuskan untuk menggunakan Return On Equity sebagai alat untuk mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan.

2.1.3.5 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membedakan hasil dan tindakan yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut Mamduh M.Hanafi (2016:69) menyatakan bahwa pengukuran kinerja didefinisikan sebagai *performing measurement* (pengukuran kinerja) adalah "...kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen dan keefektifan dalam pengoprasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktifitas perusahaan yang telah dilakukan pada periode waktu tertentu."

Mulyadi (2016:415) menyebutkan bahwa : "Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya".

Mulyadi (2016:416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah :

“Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.”

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya, untuk menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktu serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Secara formal produk akhir dari hasil pengukuran kinerja diwujudkan dalam suatu laporan yang disebut laporan kinerja.

Menurut Mulyadi (2016:416) menyebutkan bahwa : “Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen yaitu :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.”

2.1.3.6 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Munawir (2007:30) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu :

1. “Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.
2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilakukan baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Rentabilitas atau Profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Stabilitas Ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayarkan hutang-hutangnya serta membayar dividen secara teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan”.

Selanjutnya menurut Dani dan Hasan (2005) dalam Like Monisa Wati (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan antara lain : “*Good Corporate Governance* (GCG). Karena prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan”.

Demikian pula menurut Agus Sartono (2010:120) juga menyatakan bahwa : “*Financial Leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* ikut berperan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan. Tariq et al (2013) menyatakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran perusahaan, pajak, non debt tax Shield dan likuiditas.

2.1.4 Saham

2.1.4.1 Pengertian Saham

Menurut PSAK No. 42, saham/efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi, tanda bukti utang, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

Menurut Irham Fahmi (2014:270) saham adalah:

- a. “Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal-modal pada suatu perusahaan.
- b. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
- c. Persediaan yang siap untuk dijual”.

Menurut Jogiyanto (2016:67), saham adalah : “Suatu bentuk penjualan hak kepemilikan perusahaan kepada pihak lain”.

Menurut Samsul (2009:55), adalah :

“Saham adalah tanda bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Bukti suatu pihak disebut sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sbagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). Pada umumnya DPS disajikan beberapa hari sebelum RUPS diselenggarakan dan setiap DPS dapat melihat DPS tersebut”.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa saham adalah bukti kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan dan merupakan alternative sumber dana bagi perusahaan penerbit saham.

2.1.4.2 Jenis-jenis Saham

Menurut Jogiyanto (2016:12), pada umumnya saham dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Saham Biasa (*common stock*)
Saham biasa merupakan sumber keuangan utama yang harus ada pada suatu perusahaan publik dan merupakan berharga yang paling umum dan dominan diperdagangkan di Bursa. Saham biasa adalah “kepemilikan atas masyarakat.” Pemilik berhak menentukan apakah akan menerima dividen atau menduduki posisi di dalam perusahaan.
2. Saham Preferen (*preferred stock*)
Saham preferen memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagia laba dan sisa asset dalam likuiditas dibandingkan dengan saham biasa. Perbedaannya dengan saham biasa adalah saham preferen yang memiliki dividen yang tetap, namun seperti halnya saham biasa, saham preferen tidak memiliki tanggal jatuh tempo.

Menurut Jogiyanto (2016:67) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis saham yaitu :

1. Saham Biasa (*Common Stock*)
Saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa (*Common Stock*)”. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan pemegang saham biasanya mempunyai hak ;
 - a. Hak kontrol yaitu hak pemegang saham biasa untuk memilih pemimpin perusahaan.
 - b. Hak menerima pembagian keuntungan yaitu hak pemegang saham biasa untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan.
 - c. Hak presentatife yaitu hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi harga lama dari kemerosotan nilai.
2. Saham Preferen (*Preferent Stock*)
Saham preferen memiliki sifat gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga membedakan hasil yang tetap berupa dividen preferen”. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi. Dibandingkan

dengan saham biasa, saham preferen memiliki beberapa hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.

Beberapa hak dari saham preferen adalah sebagai berikut :

- a. Hak preferen terhadap dividen yaitu hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa.
 - b. Hak dividen kumulatif yaitu hak pemegang saham preferen untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya.
 - c. Hak preferen pada waktu likuidasi yaitu hak untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan saham biasa pada saat terjadi.
3. Saham Treasuri (*Treasury Stock*)
Saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasuri yang nantinya dapat dijual kembali”.

Berdasarkan paparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis saham pada umumnya apabila dilihat berdasarkan cara pengalihannya yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama, apabila dilihat berdasarkan manfaat dan kegunaannya dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu saham preferen atau sering disebut saham unggulan, saham biasa, dan saham treasuri atau sering disebut saham yang ditarik kembali oleh perusahaan emiten.

2.1.4.3 Analisis Saham

Menurut Jogiyanto (2016:117) menyemukakan bahwa : “nilai yang berhubungan dengan saham terdiri dari tiga jenis yaitu : nilai *buku (book value)*, nilai pasar (*market value*), dan nilai intrinsik (*intrinsic value*)”.

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. “Nilai Buku (*Book Value*)
Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (*net assets*) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham.
2. Nilai Pasar (*Market Value*)
Nilai pasar berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga dari saham di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar.
3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)
Nilai intrinsik merupakan nilai seharusnya dari suatu saham. Dua macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya dari saham adalah analisis sekuritas fundamental (*fundamental security analysis*) atau analisis perusahaan (*company analysis*) dan analisis teknis (*technical analysis*). Analisis fundamental menggunakan data fundamental yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan (misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan dan lain sebagainya), analisis teknis menggunakan data pasar dari saham (misalnya harga dan volume transaksi saham) untuk menentukan dari saham”.

Berdasarkan uraian di atas nilai pasar dan nilai intrinsik dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham yang mempunyai harga murah dan juga harga yang mahal. Nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari perusahaan. Nilai pasar yang lebih kecil dari intrinsiknya menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang murah (*undervalued*) karena investor membayar saham tersebut lebih kecil dari yang seharusnya dia bayar, sebaliknya nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang mahal (*overvalued*).

Terdapat dua analisis yang digunakan untuk menentukan nilai intrinsik dari saham yaitu analisis fundamental atau analisis perusahaan dan analisis teknis.

Menurut Jogiyanto (2016:126) yaitu :

“Anallisis fundamental menggunakan data fundamental yaitu data yang berasal dari ekuangan perusahaan (misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan dan lain sebagainya), sedangkan analisis teknis menggunakan data pasar dari saham (misalnya harga dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai dari saham).

Menurut Jogiyanto (2016:126) menyatakan bahwa :

“Untuk analisis fundamental terdapat dua pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik saham yaitu dengan pendekatan nilai sekarang (*present value approach*) dan pendekatan PER (*P/E ratio approach*)”.

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. “Pendekatan Nilai Sekarang
Pendekatan nilai sekarang disebut dengan metode kapitalisasi laba (*capitalization of income method*) karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai ; sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai dari perusahaan tergantung dari prospek perusahaan tersebut di masa mendatang dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan, maka nilai perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai-nilai arus kas (*cash flow*) masa depan menjadi nilai sekarang.
2. Pendekatan PER
Alternatif lain selain menggunakan arus kas atau arus dividen dalam menghitung nilai fundamental atau nilai intrinsik saham adalah dengan menggunakan nilai laba perusahaan (*earnings*). Salah satu pendekatan yang populer menggunakan nilai earnings untuk mengestimasi nilai intrinsik adalah pendekatan PER (*Price Earning Ratio*) atau disebut juga dengan pendekatan earnings multiplier. Per menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari earnings”.

2.1.4.4 Pengertian Harga Saham

Harga suatu saham sangat berkaitan dengan harga pasar suatu saham. Perubahan harga saham dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar sekunder. Semakin banyak investor yang ingin membeli atau menyimpan suatu saham maka harga saham akan semakin dan sebaliknya jika semakin banyak investor yang menjual atau melepaskan maka akan berdampak pada turunya harga saham.

Jogiyanto (2016:8), menyatakan bahwa :

“harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal.”

Tandelilin (2010:133), harga saham adalah :

“Harga saham merupakan cerminan dari ekspektasi investor terhadap faktor-faktor *earning*, aliran kas dan tingkat return yang dinyatakan investor, yang mana ketiga faktor tersebut juga sangat dipengaruhi kinerja ekonomi makro”.

Menurut Husnan dalam Indriani (2016), harga saham adalah:...harga saham (*stock price*) merupakan nilai sekarang (*present value*) dari penghasilan-penghasilan yang akan diterima oleh pemodal di masa yang akan datang.”

Menurut Lestari dan Suwardi (2015) menyatakan bahwa :

“Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana perusahaan atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di Bursa.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah nilai suatu perusahaan yang mencerminkan dari kekayaan suatu perusahaan tersebut.

2.1.4.5 Macam-Macam Harga Saham

Menurut Widodoatmodjo (2012:54) harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. “Harga Nominal
Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasaya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.
2. Harga Perdana
Harga perdana merupakan harga jual dan perjanjian emisi kepada investor, ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di Bursa Efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwriter*) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.
3. Harga Pasar
Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-bener mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder kecil sekali terjadi negoisasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.
4. Harga Pembukaan
Harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukaan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.

5. Harga Penutupan
Harga yang diminta oleh penjual dan pembeli saat akhir hari buka. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan ada hari bursa tersebut.
6. Harga Tertinggi
Harga yang penting tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atau suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama.
7. Harga Terendah
Harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain harga terendah merupakan lawan dari harga tinggi.
8. Harga Rata-Rata
Perataan dari harga tertinggi dan terendah. Nilai saham dapat dijadikan tolak ukur investor apakah akan membeli saham atau tidak. Harga saham yang ada di pasar modal tergantung pada kinerja perusahaan dan akan diapresiasi oleh pasar”.

2.1.4.6 Keuntungan Memiliki Saham

Menurut Irham Fahmi (2014:86) bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima yaitu :

- a. Memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun.
- b. Memperoleh *capital gain*, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal.
- c. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis *common stock* (saham biasa).

2.1.4.7 Faktor yang mempengaruhi Harga Saham

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Ali Arifin (2007:116) mengemukakan bahwa : “Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah :

1. Kondisi Fundamental Emiten
Faktor yang erat kaitannya dengan kondisi perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya manusia dan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan”.
2. Hukum Permintaan dan Penawaran
Menjadi faktor kedua yang mempengaruhi harga saham. Dengan asumsi bahwa begitu investor mengetahui kondisi fundamental perusahaan, mereka akan melakukan transaksi jual beli. Transaksi-transaksi inilah yang akan mempengaruhi fluktuasi harga saham.
3. Tingkat Suku Bunga
Dengan adanya perubahan suku bunga, tingkat pengendalian hasil berbagai sarana investasi akan mengalami perubahan. Bunga yang tinggi akan berdampak pada alokasi dana investasi pada investor. Investor produk bank seperti atau tabungan jelas lebih kecil risikonya jika dibandingkan dengan investasi dalam bentuk saham. Oleh karena itu akan menjual saham dan dananya ditempatkan di bank. Penjualan saham secara serentak akan berdampak pada penurunan harga saham secara signifikan.
4. Valuta Asing
Mata uang Amerika (Dollar) merupakan mata uang terkuat diantara mata uang yang lain. Apabila dollar naik maka investor akan menjual sahamnya dan ditempatkan di bank dalam bentuk valuta asing (valas) sehingga akan mengakibatkan implikasi yang negatif terhadap harga saham di pasar.
5. Dana Asing di Bursa
Mengamati jumlah dana investasi asing merupakan hal yang penting. Karena besarnya dana yang ditanamkan menandakan bahwa kondisi investasi di Indonesia telah kondusif yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak lagi negatif, yang tentu saja akan merangsang kemampuan emiten untuk mencetak laba. Sebaliknya jika investor asing berkurang, ada pertimbangan bahwa mereka sedang ragu atas negara ini, baik atas keadaan social, politik maupun keamanannya. Jadi besar kecilnya investasi dana asing di bursa akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan harga saham.
6. Indeks Harga Saham
Kenaikan indeks harga saham gabungan sepanjang waktu tentunya menandakan kondisi investasi dan perekonomian Negara dalam

keadaan baik. Sebaliknya jika turun, berarti iklim investasi sedang buruk. Kondisi demikian akan mempengaruhi naik turunnya saham di pasar Bursa.

7. *New and Rumors*

Berita yang beredar di masyarakat menyangkut beberapa hal baik itu masalah ekonomi, social, politik keamanan, hingga berita seputar reshuffelkabinet. Dengan adanya berita tersebut, para investor bisa memprediksi seberapa kondusif keamanan negeri ini sehingga kegiatan investasi dapat dilaksanakan. Ini akan berdampak pada pergerakan harga saham di Bursa.

Sedangkan Menurut Irham Fahmi (2014:87) ada beberapa kondisi dan situasi yang menentukan suatu saham akan mengalami fluktuasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi mikro dan makro ekonomi.
- b. Kebijakan seperti membuka kantor cabang (brand office), kantor cabang pembantu (sub brand office) baik yang dibuka di domestik maupun luar negeri.
- c. Pergantian direksi secara tiba-tiba.
- d. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan.
- e. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya.
- f. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikan terlambat.
- g. Efek dan psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham.

Menurut Jogiyanto (2016:87) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham atau indeks harga saham. Faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan ke dalam faktor fundamental yang berasal dari lingkungan internal dan faktor kondisi ekonomi yang berasal dari lingkungan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Fundamental (Lingkungan Internal)

- a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.
- b. Pengumuman pendanaan (*financing announcement*) seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan utang.
- c. Pengumuman badan direksi manajemen (*management-board of director announcement*) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisasi.
- d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan divestasi dan lainnya.
- e. Pengumuman investasi (*investment announcement*) seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penitipan usaha lainnya.
- f. Pengumuman ketenakerjaan (*labour announcement*) seperti negoisasi baru, kontak baru permohonan dan lainnya.

- g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan seperti peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal, *Earnings Per Share* (EPS), *Price Earning Ratio* (PER), *Dividen Per Share*, *Net Profit Margin*, *Return on Assets* (ROA), dan lainnya.
2. Faktor Kondisi Ekonomi (lingkungan Eksternal)
- a. Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan berbagai regulasi serta deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 - b. Pengumuman hukum (*legal announcement*) seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajemennya dan tuntutan perusahaan terhadap manajemernya.
 - c. Pengumuman industry sekuritas (*securities announcement*) seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan utang.
 - d. Gejolak politik-ekonomi dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan nilai tukar juga merupakan faktor yang mempengaruhi signifikan pada gerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia.
 - e. Berbagai isu dari dalam negeri dan luar negeri.

2.1.4.8 Penilaian Harga Saham

Dalam penelitian ini penilaian harga saham yang digunakan yaitu harga saham penutupan (*closing price*) .

Menurut Widodoatmojdo (2012:54) penutupan harga saham adalah :

“Harga yang diminta oleh penjual dan pembeli saat akhir hari bursa buka. Pada keadaan demikian, bias saja terjadi pada saat akhir bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar”.

Menggunakan penutupan harga saham karena harga ini dapat menentukan naik turunnya harga suatu saham.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Dalam menyusun penelitian ini, penulis mempelajari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulan

| No | Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------|---|---|---|---|
| 1 | Suzi Handayani (2013) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan BUMN (Persero) di Indonesia) | Variabel Independen : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Indikator Variabel : Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. |
| 2 | Bambang Tjahjadi (2013) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , | Variabel Independen : <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran | Indikator Variabel: Kepemilikan Institusional, | Hasil penelitian Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| | | Ukuran perusahaan, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan (Studi perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017) | Perusahaan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Kepemilikan Manajerial Lokasi Penelitian : Studi perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 | tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, Leverage berpengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan |
| 3 | Eny Maryanti dan Wildah Nihayatul Fithri (2017) | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance,</i> Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan | Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Indikator Variabel: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit Lokasi penelitian: (Studi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia) | Hasil penelitian bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan GCG yang dibentuk dengan kepemilikan institusi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan GCG yang dibentuk dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | komisaris independen secara tidak langsung melalui kinerja keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusi dan komite audit secara tidak langsung melalui kinerja keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. |
| 4 | Andri Veno (2015) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur go Public (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2011 - 2013) | Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Indikator Variabel : Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit Lokasi Penelitian : Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2011 – 2013 | Hasil penelitian bahwa Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan |
| 5 | Gita Andriani Tisna, Silviana Agustami (2016) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran | Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan | Indikator Variabel : Nilai Komposit = bobot self assesment x Peringkat yang didapat | Hasil penelitian bahwa <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | | Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014) | Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Lokasi Penelitian : Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2010 – 2014 | Keuangan. |
| 6 | Adhi Sindhu Nurcahya, Endang Dwi Wahyuni, Setu Setyawan (2016) | Pengaruh Good Corporate Governance , Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Variabel Independen: Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Indikator Variabel : Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit Lokasi Penelitian : Studi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009 | Hasil penelitian pengujian secara simultan menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, ukuran perusahaan, dan Leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa hanya dewan direksi dan Leverage yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan dan secara parsial dewan komisaris, dewan komisaris independen, |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | komite audit, dan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. |
| 7 | Jessica Talenta Agustina Tambunan, Bulan Prabawani (2018) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Tahun 2012-2016) | <p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan</p> | <p>Indikator Variabel : Kinerja Keuangan menggunakan ROA</p> <p>Lokasi Penelitian : (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Tahun 2012-2016)</p> | Hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, diketahui bahwa leverage berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, diketahui bahwa struktur modal tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, diketahui bahwa ukuran perusahaan, leverage dan struktur modal secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, diketahui bahwa dari ketiga variabel independen tersebut, leverage memiliki pengaruh lebih dominan terhadap kinerja keuangan |
| 8 | Pande Putu, Enda Rastiana | Pengaruh Penerapan Gcg | Variabel Independen: Good Corporate | Indikator Variabel : Dewan Komisaris | Hasil penelitian bahwa Dewan Komisaris Independen tidak |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|--|
| | Dewi Agus Indra Tenaya (2017) | Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bei Periode 2013-2016) | Governance , Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Lokasi Penelitian : (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2016) | berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Kepemilikan Insitusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. |
| 9 | Iqbal Bukhori (2017) | Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei | Variabel Independen: Good Corporate Governance , Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Lokasi Penelitian : (Studi Empiris Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2016) | Hasil penelitian bahwa Good Corporate Governance , Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|
| | | 2010) | | | |
| 10 | Ani Sulastri, Dwi Fitri, Popy Fauziati (2018) | Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013) | Variabel Independen: Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Variabel Independen : Leverage Lokasi Penelitian : (Studi Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013) | Hasil penelitian bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuanga, sedangkan Leverage berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan . |
| 11 | Joel Simatupang (2018) | Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2016 | Variabel Independen: Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Kinerja Keuangan | Indikator Variabel : Komisaris Independen, Komite Audit Lokasi Penelitian : (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2016) | Hasil penelitian bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan pengujian simultan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | kepemilikan manajerial perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan |
| 12 | Salsabila Sarafina Muhammad Saifi (2017) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) | <p>Variabel Independen: Good Corporate Governance</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan</p> <p>Lokasi Penelitian : (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)</p> | <p>Variabel Dependen : Nilai Perusahaan</p> <p>Indikator Variabel : Dewan Komisaris , Komite Audit</p> <p>Kinerja Keuangan menggunakan ROA</p> | Hasil penelitian hasil uji F model bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil uji T diperoleh hasil bahwa terdapat empat variabel berpengaruh signifikan secara parsial yaitu Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan. |
| 13 | Iis Aisyah (2016) | Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> | <p>Variabel Independen : Good Corporate Governance</p> | <p>Variabel Independen : Leverage</p> <p>Variabel Intervening : Corporate Social Responsibility</p> <p>Variabel Dependen :</p> | Hasil penelitian bahwa <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap CSR, <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> dan CSR berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | | dan Dampaknya terdapat Kinerja Keuangan (Studi pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di BEI periode 2010-2013) | | Kinerja Keuangan Lokasi Penelitian : Studi pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di BEI periode 2010-2013) | |
| 14 | Wuryanti K. Dan Siti Khotimah (2015) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Leverage dan Corporate Responsibility terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada perusahaan Manufaktur Subsektor Logam & Sejenisnya yang terdaftar di BEI periode 2012-2014) | Variabel Independen : Good Corporate Governance Indikator Penelitian : Kinerja Keuangan menggunakan ROE | Variabel Independen : Leverage, Corporate Responsibility Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Lokasi Penelitian : (Studi pada perusahaan Manufaktur Subsektor Logam & Sejenisnya yang terdaftar di BEI periode 2012-2014) | <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Cosporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Corporate Social</i> |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|--|--|---|
| | | | | | <i>Responsibility</i> dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan |
| 15 | Dian Anggraeni (2015) | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada perusahaan jasa sektor Infrastruktur, utilitis dan transportasi sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode (2010-2014) | Variabel Independen : <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : Kinerja Keuangan | Indikator Variabel : Ukuran Dewan Direksi , Ukuran Dewan Komisaris, Kinerja Keuangan menggunakan ROE Lokasi Penelitian : Studi pada perusahaan jasa sektor Infrastruktur, utilitis dan transportasi sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode (2010-2014) | Hasil penelitian bahwa Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--|---|--|---|
| 16 | Retno Puspita (2015) | Pengaruh penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Kinerja Keuangan | <p>Variabel independen: Good Corporate Governance</p> <p>Variabel dependen : Kinerja Keuangan</p> | <p>Variabel Independen : Corporate Social Responsibility</p> | <p><i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan, <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan</p> |
| 17 | Ratih Hardiyanti (2016) | Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Manufaktur subsektor Logam & sejenisnya yang terdaftar di BEI periode | <p>Variabel Independen : Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan</p> | <p>Variabel Independen : Kepemilikan Asing</p> <p>Variabel Intervening : Corporate Social Responsibility</p> <p>Lokasi Penelitian : (Studi pada Manufaktur subsektor Logam & sejenisnya yang terdaftar di BEI periode</p> | <p>Hasil penelitian bahwa Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| | | 2012-2014) | | 2012-2014) | |
| 18 | Teguh Erawati, Fitri Wahyuni (2019) | Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017) | Variabel independen: Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Variabel dependen : Kinerja Keuangan | Variabel Independen : Leverage Indikator Variabel : Kepemilikan Instusional, Kepemilikan Manajerial Lokasi Penelitian : Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017) | Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keungan perusahaan, Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keungan, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan . |
| 19 | Boly Boliawati (2016) | Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance Dan Tingkat Pengungkapan | Variabel independen: Good Corporate Governance Variabel dependen : | Variabel Independen : Corporate Social Responsibility Lokasi Penelitian : | Hasil penelitian bahwa Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja perusahaan (ROA), Variabel kepemilikan institusional tidak |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada seluruh perusahaan yang beroperasi dalam bidang Agriculture and Fishing yang tercatat di BEI pada periode 2012-2014). | Kinerja Keuangan | (Studi pada seluruh perusahaan yang beroperasi dalam bidang Agriculture and Fishing yang tercatat di BEI pada periode 2012-2014). Indikator Variabel : Kinerja Keuangan menggunakan ROA | berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan (ROA) Variabel komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan (ROA). Variabel Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan (ROA). |
| 20 | Dicky Hidayat, Topowijono (2018) | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) | Variabel Independen : Kinerja Keuangan Variabel Dependen : Harga Saham Indikator Variabel : Kinerja Keuangan menggunakan ROE | Lokasi Penelitian : (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) | Hasil penelitian bahwa variabel independen Kinerja Keuangan (ROE) yang mempengaruhi Harga Saham |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| 21 | Cristin Oktavia Tumandung, Sri Murni, Dedy N. Baramuli. (2017) | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2011 – 2015) | <p>Variabel Independen : Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel Dependen : Harga Saham</p> | <p>Lokasi Penelitian : (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2011 – 2015)</p> | Hasil penelitian bahwa Secara parsial Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham, Secara simultan, Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham. |
| 22 | Nyoman Ramdani, I Ketut Yadnyana (2016) | Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015) | <p>Variabel Independen : Good Corporate Governance</p> <p>Variabel Dependen : Harga Saham</p> | <p>Variabel Independen : Kinerja Keuangan</p> <p>Lokasi Penelitian : (Studi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015)</p> | <p>Hasil penelitian bahwa secara simultan good corporate governance yang diproksikan oleh proporsi dewan komisaris independen dan komite audit serta Kinerja Keuangan yang diproksikan oleh ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham .</p> <p>Hasil pengujian secara parsial good corporate governance yang diproksikan oleh proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian secara parsial</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | serta Kinerja Keuangan yang diproksikan oleh ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham . |
|--|--|--|--|--|--|

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan

Good Corporate Governance adalah sistem pengawasan dan keseimbangan baik internal maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) dan bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam segala bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan Wuryanti dan Siti (2015).

Menurut Muh. Arief Effendi (2009:142) ada hubungan antara GCG dengan kinerja keuangan perusahaan :

“Prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu faktor kunci sukses untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor terhadap perusahaan. Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar semakin besar timbulnya bagi kepercayaan publik sehingga bagi perusahaan yang telah *go public* saham perusahaannya akan lebih banyak diminati oleh para investor untuk investasinya dan akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.”

Qintharah (2014:50), menyatakan bahwa :

“Praktik penerapan GCG merupakan landasan yang kokoh untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang bukan semata-mata memenuhi tuntutan pemangku kepentingan, tetapi juga membangun bisnis yang berkelanjutan (*sustainable*). Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik maka perusahaan akan memiliki kinerja operasional yang lebih efisien. Kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkannya laba perusahaan sehingga akan mencerminkan tingkat ROE di perusahaan semakin tinggi. Penerapan GCG dapat memberikan jaminan kepada pihak investor bahwa dana yang telah diinvestasikan dikelola secara efisien”.

Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan menurut Gita Andriani Tisna, Silviana Agustami(2016) adalah

Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan menurut Retno Puspita (2015) pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* membantu perusahaan meningkatkan kinerja keuangan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan baik, mengurangi kecurangan yang menguntungkan individu serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *shareholders*.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran Perusahaan pada penelitian ini dinilai dengan logaritma natural nilai aktiva, dimana total aktiva menggambarkan nilai kekayaan atau harta yang dimiliki perusahaan. Semakin besar nilai total aktiva perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki harta yang semakin tinggi nilainya, sehingga bisa dikatakan besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya nilai total aktiva suatu perusahaan.

Gita Andriani, Silviana Agustami(2016), menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki aktiva besar yang kemudian dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya maka penggunaan sumber daya yang ada bisa digunakan secara maksimal dan efisien maka memperoleh keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan aktiva yang kecil tentu akan menghasilkan keuntungan sesuai dengan aktiva yang relative kecil. Selain itu jika jumlah aktiva yang dimiliki oleh

perusahaan besar maka akan menunjukkan ukuran perusahaan yang berkualitas serta kinerja yang baik dari perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin tinggi profit yang dihasilkan maka bisa dinyatakan semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Pande Putu, Enda Rastiana, Agus Indra Tenaya(2017), yang menyatakan bahwa perusahaan besar lebih memiliki tekanan yang kuat dari para *stakeholder*, agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para investornya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini manajemen untuk memenuhi harapan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan dimana semakin besar asset maka akan lebih mampu untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan Iqbal Bukhori (2017), membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Harga Saham

Kebutuhan akan pelaksanaan *good governance* dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan mendesak bagi manajemen perusahaan. Kebijakan *good governance* harus memiliki perspektif yang luas, komprehensif dan terintegrasi sehingga bisa menjadi pedoman yang dapat diandalkan.

Nyoman Ramdani, I Ketut Yadnyana (2016) mengemukakan bahwa :

“Dalam penilaian *Good Corporate Governance* semakin kecil nilai komposit pada GCG maka kualitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan sangat baik sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Hal ini berarti semakin baik kinerja

GCG maka tingkat kepercayaan dari investor menunjukkan respon yang positif”.

Menurut Sukrisno goes (2010:110) penerapan GCG merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepercayaan investor. Tingkat kepercayaan investor dapat menentukan nilai perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham.

Hasil penelitian Retno Puspita (2015) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini membuktikan bahwa GCG merupakan salah satu faktor penentu yang penting dari harga saham suatu perusahaan. Implementasi GCG yang baik, dapat melindungi perusahaan dari konflik keagenan yang dapat menyebabkan laba yang dilaporkan semu dan menyebabkan nilai perusahaan berkurang dimasa yang akan datang.

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham

Ukuran perusahaan ini mengukur seberapa besar dan kecil suatu perusahaan, dengan melihat total asset pada laporan keuangan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan sudah tidak diragukan lagi perusahaan tersebut unggul dalam segi kekayaan dan performance bagus, sehingga akan memberikan daya tarik kepada investor untuk percaya dan mau menanamkan modalnya dengan membeli saham, hal ini menyebabkan harga saham bergerak naik (Edy,Suwito, Arleen Herawaty. 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Rima Fahmi Utami (2017) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan

oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tamara Oca Viandita, Suhadak, Achmad Husaini (2013) dan Nurul Khatimah (2011) mengemukakan bahwa ternyata size atau ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.

2.3.5 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham

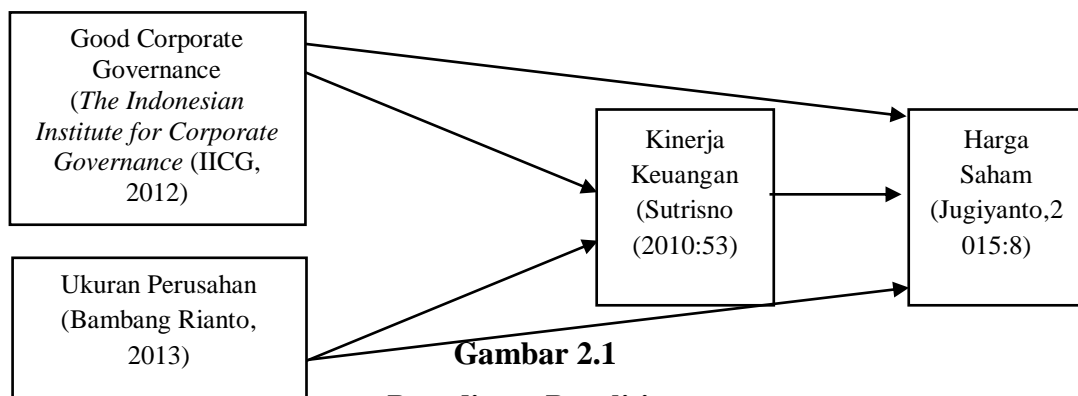
Kinerja keuangan sebuah perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan selama periode tertentu. Kinerja keuangan dapat diukur dari rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

ROE digunakan untuk mengukur penghasilan yang akan diperoleh pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka akan membawa keberhasilan bagi perusahaan sehingga mengakibatkan tingginya harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROE berpengaruh

signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Cristin Oktavia Tumandung, Sri Murni, Dedy N. Baramuli (2017) yang menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham penutupan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Nyoman Ramdani, I Ketut Yadnyana (2016) Kinerja keuangan diukur menggunakan *return on equity* (ROE), ROE merupakan pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. ROE yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. ROE yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan semakin baik, sehingga semakin tinggi investor tertarik berinvestasi dalam bentuk saham. Akibatnya, permintaan terhadap saham yang ditawarkan naik, dan akhirnya harga saham juga meningkat. Hasil penelitian bahwa Kinerja Keuangan yang diproksikan oleh ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham .

2.4 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaa. Dikatakan sementara karena jawaban yang dibeikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1. Penerapan *Good Corporate Governanc* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Hipotesis 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Hipotesis 3. Penerapan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Hipotesis 4. Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Harga Saham.

Hipotesis 5. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Harga Saham.

Hipotesis 6. Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Harga Saham.

Hipotesis 7. Penerapan *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Harga Saham secara simultan.